



**Sugianto Usulkan Pembangunan
Sejumlah Proyek Strategis
Nasional Di Kalteng**



**Sugianto Tegaskan Kunci Keberhasilan
Adalah Kerja Keras dan Kejujuran**

10



**Wagub : Pendidikan, Pilar Penting Dalam
Pembangunan Karakter dan Budaya**

15



**Ivo Sugianto Sabran Lantik Ketua
Dekranasda Palangka Raya Periode 2018-2023**

16



**DITERBITKAN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 188.44/

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi pada
Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum
pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi pada
Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol dan
Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Redaktur :

Setya SRI Saryanta

Penyedia Bahan :

Rani Diah Anggraini

Staf Redaksi :

Dewi Yulianti, Dina Meitriana, Kamala Sri Y. R.,
Winda Paskanova, Renny Patrisia,
Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangkan.

Fotografer :

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

Layout :

Benito Zuares

Operator Komputer :

Ahmad Salahudin

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

DAFTAR ISI :

Sugianto Usulkan Pembangunan Sejumlah
Proyek Strategis Nasional Di Kalteng___3

Gubernur Optimis Pilkada Serentak Di Kalteng
Berjalan Lancar dan Tertib___4

Fahrizal Fitri : Penyusunan LPPD Perlu Data
Lengkap dan Valid___5

SEKDA BUKA RAKORDA PUSAT DAN DAERAH
DINAS KOPERASI & UMKM___6

Sekda Kalteng : Pengendalian Karhutla Masih
Menjadi Prioritas Nasional 2020___7

Sugianto : Peran Kanwil Kemenkum HAM
Diperlukan Dalam Pembentukan Perda___8

Sugianto Sabran : Fungsi Arsip Sangat Vital Bagi
Pemerintah___9

Sugianto Tegaskan Kunci Keberhasilan Adalah
Kerja Keras dan Kejujuran___10

Gubernur Sugianto Dukung Kebijakan “Merdeka
Belajar” Di Kalteng___11

Pemprov Kalteng Intensifkan Pengawasan
Royalti Pertambangan___12

Februari 2020, Kalteng Inflasi 0,5 %___12

Kalteng Trade Expo 2020 Promokan Produk
Unggulan___13

KTE Diharapkan Jadi Terobosan Meningkatkan
Ekspor Kalteng___14

Wagub : Pendidikan, Pilar Penting Dalam
Pembangunan Karakter dan Budaya___15

Ivo Sugianto Sabran Lantik Ketua Dekranasda
Palangka Raya Periode 2018-2023___16

Rencana Pembangunan RS Tipe A di Kalteng
Terus Dimatangkan.___17

Gubernur : Pemprov Kalteng Intensifkan
Antisipasi Penyebaran Covid-19___17

Gubernur Sugianto Sabran Tetapkan Status
Tanggap Darurat Di Kalteng___18

Pemprov Kalteng Bentuk Gugus Tugas
Pencegahan Covid-19 di Kalteng___19

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi,
Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature
maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang
dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman
Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian
Informasi Pemerintahan Umum Biro Protokol dan Komunikasi
Publik Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya,
Telp/Fax (0536) 4200241

Website : <http://www.biropkp.kalteng.go.id>

Facebook : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>

Twitter : http://www.twitter.com/setda_kalteng

Instagram : [@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/sekretariat.daerah.kalteng)

email : buletin.isenmulang@gmail.com

Sugianto Usulkan Pembangunan Sejumlah Proyek Strategis Nasional Di Kalteng

Palangka Raya – Biro PKMP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendukung dan merealisasikan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional di Kalimantan Tengah.

Sejumlah proyek strategis nasional di Kalimantan Tengah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat untuk direalisasikan itu antara lain di bidang infrastruktur jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut dan Rumah Sakit Tipe A. “Pemprov Kalteng mengusulkan pembangunan sejumlah proyek kepada pemerintah pusat seperti infrastruktur jalan menuju pelabuhan Sigintung dan Batanjung, pembangunan Rumah Sakit Tipe A hingga perpanjangan dan pelebaran run way Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya,” jelas Sugianto Sabran dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Penyusunan RKP 2021 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Selasa (03/03/20).

Sugianto Sabran menegaskan prioritas usulan pembangunan proyek strategis nasional di Kalteng tahun 2021 tersebut meliputi pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Batanjung dan Sigintung yang akan berfungsi sebagai “outlet” untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Disebutkan, Kalimantan Tengah memerlukan pembangunan akses jalan sepanjang 52 kilometer menuju Pelabuhan Batanjung termasuk penanganan jalan nasional sepanjang 165 km dari Pelabuhan Sigintung menuju Kuala Pembuang dan Simpang Bangkal. “Jalan ini sangat strategis untuk menghubungkan Pelabuhan Batanjung dengan Jalan Nasional (Trans Kalimantan),” ucap Sugianto.

Selain itu Kalimantan Tengah juga sangat memerlukan penyelesaian pembangunan ruas jalan lintas tengah yang menghubungkan Kalteng menuju batas Kalbar sepanjang 80 km, mengingat ruas jalan tersebut sangat strategis karena berdekatan dengan batas Indonesia – Malaysia dan berkaitan dengan isu keamanan, sekaligus membuka keterisolasian masyarakat pedalaman Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Demikian juga di sektor kesehatan, pemerintah provinsi Kalteng saat ini terus mematangkan rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe A di Palangka Raya yang memerlukan dukungan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan membantu masyarakat yang kurang mampu. “Usulan pengembangan RSUD Doris Sylvanus menjadi Tipe A ini mengingat RSUD Doris Sylvanus masih Tipe B sehingga banyak pasien dari Kalteng yang harus dirujuk untuk berobat ke Rumah Sakit di luar Kalimantan Tengah,” kata Sugianto.

Gubernur Sugianto Sabran pada Rapat



Koordinasi Penyusunan RKP 2021 di Kementerian PPN/Bappenas tersebut, juga mengusulkan perpanjangan landasan pacu Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter dengan lebar 45 meter sehingga mampu didarati pesawat berbadan lebar. “Ini untuk mendukung pengembangan Bandara Tjilik Riwut menjadi Embarkasi Haji penuh dan mendukung kelancaran investasi bernilai ekspor”, tegas Sugianto.

Pemprov Kalteng juga telah mencadangkan areal seluas 2.500 hektar untuk rencana pembangunan Bandara baru di Sebuai Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama hilirisasi industri sawit di wilayah barat provinsi Kalimantan Tengah serta pembangunan bendungan Muara Joloi Kabupaten Murung Raya untuk pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 284 MW yang sangat diperlukan masyarakat untuk menjamin kemandirian dan ketahanan energi berkelanjutan, yang perlu dukungan pusat.***



Gubernur Optimis Pilkada Serentak Di Kalteng Berjalan Lancar dan Tertib.

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai persiapan Pilkada Serentak 2020 antara lain membentuk Desk Pilkada Provinsi Kalteng dan Desk Pilkada Kabupaten serta menyediakan anggaran untuk operasional Desk Pilkada termasuk dana Pilkada.

Pemerintah Provinsi Kalteng juga terus melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan sosialisasi tentang netralitas ASN, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait masalah teknis dan inventarisasi data serta menyiapkan aplikasi pendukung untuk menghimpun data.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng mengemukakan hal tersebut dalam pertemuan dengan Tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Palangka Raya, Kamis (05/03/20).

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Fahrizal Fitri mengharapkan kunjungan Tim Kemenko Polhukam ke Kalteng ini dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi dan manfaat bagi seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan Dinas/Badan/Instansi terkait

penyelenggaraan Pilkada.

Ditegaskan, salah satu aspek menentukan dalam penyelenggaraan Pilkada yang baik adalah adanya sinergitas dan kerjasama yang baik dari penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Daerah serta TNI dan Polri selaku aparat keamanan. “Untuk itu semua elemen tersebut diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam menyukseskan gelaran Pilkada yang aman, lancar, jujur dan adil”, tegas Sugianto.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI pada Februari 2020 mencatat Provinsi Kalimantan Tengah berada di peringkat 6 dari 9 Provinsi yang melaksanakan Pilkada dan Kabupaten Kotawaringin Timur berada di peringkat 5 dari 224 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada.

Namun Gubernur mengharapkan pesta demokrasi itu tidak menggoyahkan persatuan dan kesatuan yang ada di Bumi Tambun Bungai dan para kontestan dapat bersaing secara sehat. “Saya yakin dan percaya dengan usaha, komitmen dan sinergitas yang baik dan doa kita bersama, Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kotawaringin Timur dapat berlangsung secara aman, damai dan kondusif dengan partisipasi pemilih yang tinggi,” kata Sugianto Sabran.

Tim Kemenko Polhukam yang dipimpin Asdep 3/1 Poldagi Brigjen TNI Yusran Yunus mengingatkan akan adanya potensi kerawanan yang bisa terjadi pada tahap penyusunan DPT, pencalonan serta kampanye hingga penghitungan suara dan rekapitulasi suara. “Potensi kerawanan tersebut

antara lain bisa berasal dari politik uang, pemalsuan dokumen, kampanye hitam dan manipulasi penghitungan suara”, jelas Yusran Yunus.

Kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam ke Kalteng tersebut untuk menghimpun informasi dan data dari Dinas Instansi terkait pelaksanaan Pilkada di Kalteng sebagai masukan bagi pimpinan Kemenko Polhukam dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terkait pemantauan tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2020.***



Fahrizal Fitri : Penyusunan LPPD Perlu Data Lengkap dan Valid



Pelaporan dan EPPD.

Sekda Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menegaskan Rakor dan Konsultasi ini sebagai media diseminasi informasi yang efektif, khususnya yang terkait dengan strategi dan tata cara serta kiat-kiat penyusunan LPPD dengan IKK nya. “Hal ini sebagai upaya kita mengidentifikasi dan menginventarisir berbagai permasalahan, kendala dan kelemahan dalam penyusunan LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah, sekaligus mencari solusi sehingga akan didapatkan kesamaan persepsi untuk mewujudkan ketersediaan data yang lengkap dan valid”, tegas Sekda.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Kalteng Akhmad Husain mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam Rakor dan Konsultasi tersebut antara lain untuk mendapatkan masukan dan arahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah serta tersedianya LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersajikan sesuai pedoman penyusunan LPPD dan mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan relevan dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Selain itu adanya sinkronisasi data IKK yang bersumber dari agregasi capaian kinerja Kabupaten dan Kota yang merupakan salah satu point penilaian utama dalam mengukur kinerja pemprov Kalteng serta adanya keseriusan para Kepala Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam melaporkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk LPPD.

Rakor dan Konsultasi tersebut diikuti Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng dengan nara sumber dari Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Wilayah III Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah serta dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI.***

Palangka Raya – Biro PKP. Sebagaimana ketentuan Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai ketentuan Pasal 69 UU Nomor : 23 tahun 2014. Penyusunan LPPD itu diatur dalam PP Nomor : 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi.

Untuk menindaklanjuti ketentuan PP tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Pemerintahan Setda Kalteng menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Palangka Raya, Selasa (03/03/20).

Rakor dan Konsultasi ini bertujuan menyamakan persepsi dari berbagai aspek yang terkait dengan penyusunan LPPD antara lain tentang format instrument hingga petunjuk pengisian indikator kinerja kunci yang digunakan dalam penyusunan LPPD 2019 sehingga Tim Penyusun LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota mendapatkan pemahaman terhadap sistematika penyusunan LPPD, definisi operasional dan petunjuk teknis Indikator Kinerja Kunci (IKK) khususnya terhadap IKK baru, sesuai amanat PP 13/2019 tentang



SEKDA BUKA RAKORDA PUSAT DAN DAERAH DINAS KOPERASI & UMKM

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Tengah gelar Rapat Koordinasi Daerah Perencanaan Pusat dan Daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Hotel Aquarius Palangka Raya, Jumat (13/03/2020). Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri.

Dalam sambutannya, Sekda Kalteng menyampaikan bahwa rakorda tersebut dirasa tepat dalam meningkatkan dan memantapkan sinergi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2020 dan dipertajam pada tahun 2021.

Dalam kurun RPJMN tahun 2014-2019 dan RPJMD tahun 2016-2021, kebijakan dan langkah-langkah dalam memberdayakan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah telah dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di 13 Kabupaten dan 1 Kota, melalui berbagai program-program dan kegiatan strategis yang berkesinambungan untuk keberlangsungan pemberdayaan Koperasi dan UMKM meliputi berbagai program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat. Program dimaksud antara lain Program Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran yang berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

“Koperasi dan UMKM menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam perekonomian di Kalimantan Tengah yang berbasis kerakyatan. Pada kenyataannya masih ditemui permasalahan diantaranya dalam pengembangan dan memajukan usaha, seperti masih lemahnya daya saing, sumber daya manusia, akses permodalan, manajemen, teknologi dan pemasaran,” ungkap Sekda

dalam sambutannya.

“Tentunya kita semua sepakat bahwa sebuah program kegiatan bukanlah produk akhir, akan tetapi bagaimana program kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memiliki indikator yang dapat diukur, yang pada akhirnya mempunyai manfaat (benefit) yang dapat menumbuhkan kembangkan Koperasi dan UMKM yang mempunyai daya saing dan meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat (Koperasi dan UMKM).” lanjutnya.

“Saya berharap Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan di Kalimantan Tengah hendaknya mampu mengangkat dan memanfaatkan potensi lokal yang mempunyai ciri produk serta memiliki nilai jual secara ekonomis yang dalam prosesnya mempunyai multiplayer efek secara ekonomi sejak proses bahan baku hingga barang jadi, yang berdampak kepada perluasan lapangan kerja hingga sampai pemasaran,” tuturnya.

Berkaitan kebijakan nasional tentang Reformasi Total Koperasi, jumlah Koperasi di Kalimantan Tengah secara kuantitas maupun kualitas memerlukan perhatian yang serius. Data per 31 Desember 2019 sebanyak 3.146 unit (aktif 2.394 unit dan tidak aktif 752 unit). Tahun 2019 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 473 Koperasi atau 19,76 %, mengalami kenaikan sebesar 1,59 % dibanding periode yang sama tahun 2018 sebesar 18,17% dari jumlah koperasi aktif. Sedangkan Koperasi yang mempunyai sertifikat NIK sebanyak 320 Koperasi atau 13,67 o/o dari Jumlah koperasi yang aktif.

“Terkait data diatas saya berharap hendaknya keberadaan koperasi benar—benar dapat menunjukkan fungsi dan perannya secara nyata. Untuk itu Reformasi Koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan Rehabilitasi,



Reorientasi, dan Pengembangan,” tutur Sekda.

Melalui Rakroda ini diharapkan semua program dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM yang diusulkan dan direncanakan pada tahun 2021 dapat disinergikan dan disinkronkan oleh masing masing OPD, baik Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

“Oleh karenanya itu saya minta agar Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKMKabupaten/Kota se Kalimantan Tengah mencermati kembali program dan kegiatan yang direncanakan didaerah pada Tahun 2021 yang akan datang, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk dipadukan/disinergikan.” lanjutnya.

Peluang-peluang yang ada yang dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah pada Tahun 2020, antara lain adalah pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi, fasilitasi bantuan permodalan kepada koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Deputy Bidang Pembiayaan (Wira Usaha Pemula), Pengembangan PLUT-KUMKM, Fasilitasi

pembuatan Akta Koperasi, Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Kemasan dan HKI, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, Pelatihan-pelatihan dan Diklat-diklat dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan didaerah melalui DAK- Non Fisik. Ditambahkan oleh Sekda, Dinas Koperasi dan UMKM perlu melakukan terobosan khususnya di masa mewabahnya virus corona saat ini, jangan sampai UMKM sebagai ekonomi kerakyatan omzetnya menurun.

Jika program-program tersebut di atas dapat disinergikan dengan baik, maka menurut Sekda, kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Tengah dapat diatasi dan ditanggulangi dan tingkat ekonomi akan menjadi lebih baik.

Turut hadir dalam Rakorda tersebut antara lain Deputy Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Suparno, Kepala Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Ati Mulyati, serta para pejabat yang membidangi Koperasi dan UMKM se-Kalimantan Tengah. ***

Sekda Kalteng : Pengendalian Karhutla Masih Menjadi Prioritas Nasional 2020

Palangka Raya – Biro PKP. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla masih menjadi salah satu Program Prioritas Nasional tahun 2020.

Meskipun adanya tren penurunan kejadian karhutla dan dampaknya dalam periode 2015-2019, tidak menyurutkan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penguatan strategi pencegahan dan pemadaman dini karhutla yang disertai dengan pemberian efek jera bagi para pelaku karhutla. “Penguatan strategi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat, ekologi, teknis dan hukum yang berkeadilan”, ungkap Sekda Kalteng Fahrizal Fitri di hadapan peserta Raker Pemantapan Penanggulangan Karhutla Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan Tahun 2020 di Palangka Raya, Rabu (04/03/20).

Fahrizal mengemukakan arahan Presiden Joko Widodo tanggal 5 Februari 2020 tentang beberapa hal penting harus dilaksanakan dalam pengendalian karhutla yang meliputi upaya pemadaman apabila ditemukan api sekecil apapun,

penataan ekosistem gambut, mencari solusi permanen untuk mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi.

Selain itu penegakkan hukum secara tegas serta peningkatan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan. “Lima hal penting arahan Presiden itu perlu diimplementasikan secara terpadu oleh OPD terkait, TNI/Polri, UPT KLHK, Lembaga Akademik, LSM, Pelaku Usaha dan masyarakat luas di provinsi Kalimantan Tengah”, tegas Sekda.

Disebutkan, faktor utama terjadinya karhutla di Kalteng adalah ulah manusia yang diperparah dengan dampak El Nino dan dominasi lahan gambut. Untuk itu perlu solusi permanen dalam pencegahan kebakaran yang disengaja karena motif ekonomi dengan memperhatikan kearifan lokal dan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. “Karena itu upaya pencegahan karhutla lebih prioritas daripada pemadaman karhutla”, imbuh Fahrizal.

Raker yang mengusung tema “Bersama Dalam Pencegahan Karhutla Berbasis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa” itu bertujuan mengimplementasikan arahan Presiden dalam pencegahan dan pengendalian karhutla melalui pemantapan dan penajaman kegiatan pengendalian karhutla 2020 di provinsi Kalimantan Tengah. ***

Sugianto : Peran Kanwil Kemenkum HAM Diperlukan Dalam Pembentukan Perda

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor : 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor : 12 tahun 2011, sangat membantu Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik dan adil sebagai sebuah instrumen yuridis untuk mengatur, mengurus, menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah.

Karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kewajiban membantu Pemerintah Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. Peningkatan kualitas produk perundang-undangan maupun peraturan daerah merupakan tuntutan mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan negara hukum. "Untuk itu diperlukan sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkum HAM", tegas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ketika membuka Rapat Koordinasi Kanwil Kemenkum HAM dengan Pemda Kalteng dan Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2018 di Palangka Raya, Kamis (05/03/20).

Kantor Wilayah Kemenkum HAM sebagai instansi vertikal di daerah harus mampu menjadi ujung tombak Law and Human Right di daerah dan memberikan masukan serta melakukan harmonisasi dalam perumusan kebijakan pembentukan produk hukum di daerah. "Peran aktif perancang Peraturan Perundang-Undangan diperlukan agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk dengan Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota", kata Sugianto.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kapasitas SDM yang handal dan mumpuni dalam rangka meningkatkan kualitas analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di pusat dan daerah sehingga akan menciptakan produk hukum yang berkualitas dan kompeten.

Sugianto Sabran pada Rakor Kanwil Kemenkum HAM tersebut juga mengemukakan ketentuan mengenai kewajiban korporasi menyampaikan informasi pemilik manfaat melalui sistem pelayanan administrasi korporasi agar korporasi tidak dapat dijadikan sebagai alat pencucian uang.

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tindak pidana pencucian uang dan tindak

pidana pendanaan terorisme merupakan tindak pidana yang melewati batas-batas negara yang selama ini banyak berlindung di balik suatu badan atau korporasi. "Diharapkan melalui Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2018 ini maka tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dicegah", pungkas Sugianto Sabran.

Sementara itu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI diwakili Sekretaris Ditjen Priyanto menegaskan penataan Peraturan Perundang-Undangan sangat diperlukan karena banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lain.

Disebutkan, antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan antara Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. "Presiden memerintahkan Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh Kepala Daerah untuk mengevaluasi peraturan Perundang-Undangan yang ada agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia, salah satunya ditempuh dengan kebijakan Omnibus Law," jelas Priyanto.

Saat ini Kanwil Kemenkum HAM melakukan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, Bupati dan Walikota. Karena itu sangat diperlukan revitalisasi Kanwil Kemenkum HAM sebagai Law and Human Right Center untuk mendukung RUU Peraturan Daerah. "Sinergitas dalam proses Rancangan Peraturan Daerah merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan produk Peraturan Daerah yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi sehingga muaranya adalah kesejahteraan masyarakat di pusat maupun daerah," tegasnya.

Pada Rakor tersebut dilakukan Penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenkum HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati/Walikota se-Kalteng dan Perguruan Tinggi di Kalteng tentang Pembinaan dan Pelayanan Bidang Hukum dan HAM, Keimigrasian dan Pemasarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rakor itu juga dihadiri Anggota DPR RI Agustiar Sabran, Direktur Fasilitas Perencanaan Perda dan Pembinaan Perancang Nuryanti Widyastuti, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Kalteng Ilham Djaya serta Bupati/Walikota se-Kalteng dan unsur Forkompimda.***

Sugianto Sabran : Fungsi Arsip Sangat Vital Bagi Pemerintah

Palangka Raya - Biro PKP. Arsip memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif dan memori kolektif tersebut adalah identitas dan harkat suatu bangsa. Kesadaran moral untuk menyelamatkan arsip merupakan bukti pertanggungjawaban dan warisan untuk menghindari hilangnya informasi.

Pengelolaan kearsipan pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk mengelola segala dokumen yang ada dalam suatu instansi sehingga dapat digunakan sebagai penunjang aktivitas instansi dalam mencapai tujuannya.

"Kearsipan merupakan ilmu terapan yang sangat dinamis sehingga perkembangannya sangat terbuka terutama bagi kita semua yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa", tegas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah ketika membuka Diklat Administrasi Kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 di Palangka Raya, Senin (9/3/2020).

Sugianto Sabran mengharapkan peserta Diklat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya di bidang kearsipan. "Saya berharap pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang saudara peroleh selama mengikuti Diklat ini dapat diterapkan dengan baik. Ilmu yang diperoleh tidak ada artinya jika tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas di instansi masing-masing", terang Sugianto.



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalteng Sri Widanarni menjelaskan Diklat ini bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang administrasi kearsipan demi terwujudnya pelayanan prima dengan menasar PNS yang mengelola bidang administrasi kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. "Diharapkan dengan dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Administrasi ini dapat mewujudkan PNS yang kompeten dalam mengelola administrasi kearsipan", ujar Sri Widanarni.

Diklat Kearsipan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 9 hingga 13 Maret 2020 di BPSPDM Provinsi Kalteng itu diikuti 40 orang peserta dari Perangkat Daerah Provinsi Kalteng yang membidangi administrasi kearsipan, dengan Narasumber dari Arsip Nasional RI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalteng serta Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalteng.***



MOTIVASI DAN INSPIRATIF

Kisah Putera Terbaik Kalimantan Tengah Membangun Indonesia Dengan Program "KALTENG BERKAH"

TEMA : "Kisah Penjual Air Dan Es Lilin Menjadi Gubernur"

Selasa, 10 Maret 2020

Media Partner

Dr. H



Sugianto Tegaskan Kunci Keberhasilan Adalah Kerja Keras dan Kejujuran

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Kehadiran Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di hadapan siswa-siswi dan mahasiswa bukanlah hal yang langka. Hampir di setiap kunjungannya ke daerah Kabupaten, Sugianto Sabran selalu membagi waktu dan menyempatkan diri bertatap muka dengan kalangan pelajar dan mahasiswa untuk memberikan semangat dan motivasi kepada generasi penerus bangsa tersebut.

Demikian juga kehadiran Sugianto Sabran di lingkungan Kampus IAIN Palangka Raya, Selasa pagi (10/03/20) untuk memberikan semangat, motivasi dan inspirasi dengan tema "Kisah Penjual Air dan Es Lilin Menjadi Gubernur", disambut antusias oleh mahasiswa dan pelajar SMA/SMK/MA dan mahasiswa IAIN Palangka Raya.

Sugianto Sabran selaku narasumber memberikan motivasi kepada para pelajar dan mahasiswa agar tidak mudah menyerah pada keadaan, teruslah berusaha dan tidak lupa berdoa. "Untuk keluar dari kemiskinan, kuncinya adalah bekerja keras yang tentu saja diiringi doa," kata Sugianto seraya menceritakan kondisi kehidupan masa mudanya yang pernah membantu orang tua berjualan kue dan es lilin tersebut.

Gubernur yang memiliki delapan saudara kandung itu,

juga memberikan kiat kepada para pelajar dan mahasiswa agar selalu menjaga kepercayaan dengan kejujuran dan meminta doa orangtua untuk mencapai kesuksesan serta menjauhkan diri dari pergaulan remaja yang dapat merugikan diri sendiri.

Sugianto Sabran dalam acara dialog yang diikuti sekitar 1000 pelajar SMA/SMK/MA dan mahasiswa IAIN Palangka Raya itu, juga menyerahkan Beasiswa Indonesia Cerdas (BIC) dari BRI kepada tiga mahasiswa IAIN Palangka Raya.

Dialog Gubernur dengan pelajar dan mahasiswa itu dihadiri anggota DPR RI Agustiar Sabran, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Mofit Saptono, Rektor IAIN Palangka Raya H. Khairil Anwar dan anggota Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah Ibnu Elmi A.S. Pelu.***



Gubernur Sugianto Dukung Kebijakan “Merdeka Belajar” Di Kalteng

Belajar Abad 21 untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul. Ini patut kita dukung dengan baik dan sukseskan,” tegasnya.

Gubernur mengimbau para guru di Kalimantan Tengah agar turut mendukung dan mensukseskan kebijakan tersebut. “Mari kita dukung dan sukseskan kebijakan Pemerintah yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut,” ucap Sugianto Sabran.

Dijelaskan, Jambore Guru Kalteng BERKAH ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus membumikan Pramuka di Kalimantan Tengah. “Gugus-Gugus Depan yang ada di Kalimantan Tengah akan mengikuti kursus handal supaya membumikan Pramuka di Kalimantan Tengah dengan tujuan dapat membentuk karakter anak-anak muda seperti kejujuran, ketaqwaan, cinta alam dan lingkungannya sebagaimana revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi,” paparnya.

Dalam dialog dengan peserta Jambore, Sugianto Sabran menerima masukan dan aspirasi mengenai permasalahan yang ada di sekolah termasuk mengenai jumlah masyarakat miskin di Kalimantan Tengah yang tidak dapat melanjutkan sekolah. “Kita ingin menggratiskan orang-orang yang miskin di samping perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan. Kompetensi para guru, guru GTT juga akan terus kita mantapkan,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran di hadapan peserta Jambore menegaskan bahwa Jambore Guru Kalteng BERKAH ini sebagai ajang silaturahmi dan membumikan Pramuka di kalangan para pendidik. “Banyaknya kegiatan kepramukaan dapat dimanfaatkan sebagai ajang aktualisasi dan hiburan bagi guru-guru yang sehari-hari sibuk mengajar”, kata Ivo Sugianto Sabran.***

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran membuka Jambore Guru Kalteng BERKAH Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe Palangka Raya, Kamis (5/3/2020).

Jambore Guru Kalteng BERKAH yang berlangsung dua hari itu 2505 peserta, diisi dengan materi penguatan karakter dan kapasitas Kepala Sekolah dan Guru dalam menghadapi era merdeka belajar serta penanaman pohon di Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe.

Gubernur Sugianto Sabran menegaskan dukungannya terhadap kebijakan “Merdeka Belajar” yang dicanangkan pemerintah antara lain menggantikan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) dengan Ujian Sekolah dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Selain itu Guru juga bebas mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel. “Keempat kebijakan tersebut memiliki tujuan menumbuhkan Kultur



Pemprov Kalteng Intensifkan Pengawasan Royalty Pertambangan

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terus mengintensifkan pengawasan royalty di sektor pertambangan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selama dua bulan terakhir tahun 2020 tercatat royalty dari sektor pertambangan di Kalimantan Tengah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp.409 miliar dari target Rp.967 miliar. “Pemprov Kalteng terus berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari royalty sektor pertambangan. Ini terus dilakukan pengawasan di lapangan dengan sistem sistem



H. Sugianto Sabran
Gubernur Kalimantan Tengah

online” tegas Sugianto Sabran seusai memantau pengawasan royalty sektor pertambangan menggunakan sistem online di Kantor Dinas ESDM Kalteng, Selasa (17/03/20).

Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Ermal Subhan menjelaskan pihaknya terus melakukan pengecekan terhadap pengawasan sistem online PNBP royalty sektor pertambangan.

Ermal Subhan mengatakan untuk bulan Maret terus dilakukan pemantauan. “Ini terus dilakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan dan sistem onlinenya agar pengusaha dapat memenuhi kewajibannya”, katanya.***

Februari 2020, Kalteng Inflasi 0,5 %

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Kalimantan Tengah pada Februari 2020 mengalami inflasi 0,59 %, meningkat dibanding inflasi Januari sebesar 0,06 %. Namun TPID Kalteng dalam rilisnya kepada sejumlah Wartawan di Palangka Raya, Senin (03/03/20) menyebutkan inflasi Kalteng masih terkendali.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko yang didampingi Analis Fungsi Asesmen BI Kalteng Yudo Herlambang dan perwakilan sejumlah OPD terkait dalam jumpa pers tersebut juga menjelaskan IHK Palangka Raya secara spasial mengalami inflasi 0,63 % dan Sampit 0,55 %, namun capaian inflasi 2 Kota tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Januari 2020.

TPID Kalteng memperkirakan prospek inflasi periode Maret 2020 dapat dipengaruhi oleh kelompok Administered Price antara lain harga cukai rokok yang akan naik pada awal tahun 2020 dan kelompok angkutan yang kemungkinan akan mengalami penurunan harga setelah berlalunya

masa libur akhir tahun dan libur sekolah.

Sementara kelompok Core antara lain komoditas ikan tangkapan yang suplainya berkurang selama musim penghujan dan volatilitas harga komoditas emas perhiasan masih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang terus diwarnai ketidakpastian.

Demikian juga kelompok Volatile Foods dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas bawang merah dan bawang putih semakin tinggi, yang disertai kenaikan harga gula karena stoknya semakin menipis.

Yuas Elko menegaskan TPID Kalteng terus berupaya mengelola program rutin untuk mengantisipasi prospek tersebut melalui pemantauan harga pasar, pengendalian ekspektasi masyarakat, menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas yang didatangkan dari luar daerah serta meningkatkan kualitas pemanfaatan kandang penyangga dan kolam penyangga termasuk pasar penyeimbang guna menjaga kestabilan harga dan program supply chain daging ayam segar beku.***

Kalteng Trade Expo 2020 Promokan Produk Unggulan

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam event Kalteng Trade Expo Tahun 2020 mempromosikan potensi daerah dan produk unggulan berorientasi ekspor kepada masyarakat luas.

Komoditi unggulan Kalteng yang dipromosikan dalam KTE itu antara lain produk rotan, getah nyatu dan herbal khas Kalimantan Tengah yang diharapkan menjadi produk unggulan di kancah internasional. “Saya menyambut baik pameran Kalteng Trade Expo sebagai ajang gelaran produk-produk unggulan kreatif dan inovatif yang berorientasi ekspor serta dikemas melalui karya-karya kekinian yang kental akan nilai budaya dan tradisi”, kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Kalteng Trade Expo 2020 di Arena Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya, Sabtu (7/3/20).

Disebutkan, potensi Kalteng cukup besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan. “Komoditi unggulan kita seperti rotan, getah nyatu dan produk-produk herbal khas Kalimantan Tengah dapat turut andil dalam perdagangan luar negeri. Potensi alam kita tersebut begitu besar dan berpeluang kita maksimalkan menjadi produk unggulan Kalteng di kancah internasional”, imbuhnya.

Untuk itu Sugianto Sabran mengharapkan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar mendorong para pelaku usaha seperti UKM dan eksportir terus menambah negara tujuan ekspor sehingga produk-produk unggulan Kalimantan Tengah dapat menembus pasar internasional. “Saya berharap tahun depan melalui ajang Kalteng Trade Expo ini para eksportir dapat mendukung dan menggelar produk-produk unggulannya sekaligus mengundang investor luar negeri agar terjadi kontak dagang yang



berkesinambungan,” pungkasnya.

Kalteng Trade Expo 2020 ini diisi 84 stan dari pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, instansi vertikal, swasta dan pelaku UMKM yang terdiri 24 Stan Indoor dan 60 Stan Outdoor. Selain itu juga digelar Pasar Rakyat guna memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pedagang kecil.

Event Kalteng Trade Expo 2020 yang berlangsung lima hari hingga 11 Maret 2020 dibuka tiap hari mulai Pukul 10.00 s.d 21.30 WIB di Arena Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya.

Pembukaan KTE itu ditandai dengan penabuhan katambung oleh Sekda Fahrizal Fitri yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Indro Wiyono dan Kepala Dinas Dagperin Aster Bonawaty serta dilanjutkan dengan pemotongan pita dan meninjau sejumlah stan peserta KTE 2020.***



KTE Diharapkan Jadi Terobosan Meningkatkan Ekspor Kalteng

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Kalteng Trade Expo yang digelar tanggal 7 s.d 11 Maret 2020 berakhir dan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng di Arena Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya, Rabu malam (11/3/2020).

KTE yang diprakarsai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng ini diikuti 29 stand indoor dan 60 stand outdoor yang terdiri SOPD lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Kalteng serta para pelaku usaha binaan sebagai ajang promosi bagi produk-produk unggulan Kalteng yang berorientasi ekspor. “Kegiatan ini diharapkan menjadi sebuah terobosan guna lebih mengembangkan hasil karya nyata dalam upaya bersama untuk meningkatkan ekspor Kalimantan Tengah,” beber Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Fahrizal Fitri saat menutup KTE 2020 tersebut.

Disebutkan, meningkatnya ekspor produk unggulan Kalteng tidak terlepas dari keseriusan dan komitmen semua pihak untuk menciptakan peluang. “Saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah merasa turut berbangga hati dengan pelaksanaan event Kalteng Trade Expo 2020 yang berjalan aman, lancar, meriah dan sukses. Saya percaya masing-masing memperoleh manfaat dan keuntungan secara finansial melalui transaksi-transaksi ekonomi di ajang promosi ini,” ungkap

Sugianto Sabran mengapresiasi pelaksanaan KTE 2020.

Namun Gubernur menilai dalam konteks perdagangan global, pengusaha eksportir dan unsur yang mewakili Kabupaten/Kota masih belum berpartisipasi dan mengambil bagian secara signifikan untuk mempromosikan produk unggulan yang berorientasi ekspor melalui ajang ini. “Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri di masa yang akan datang untuk melibatkan para eksportir Kalimantan Tengah untuk turut mengambil bagian dalam Kalteng Trade Expo ini,” tegasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng Aster Bonawaty mengungkapkan hasil pantauan langsung oleh panitia di lapangan tercatat total nilai transaksi selama KTE 2020 mencapai Rp 2,3 miliar. “Angka ini naik 12 % dari tahun 2019 sebesar Rp 2 miliar,” terang Aster seraya menjelaskan tingginya angka-angka transaksi ini antara lain didukung oleh penjualan perumahan secara besar-besaran.

Penutupan KTE 2020 ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan bagi stand-stand terbaik yang diraih stand Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kalteng meraih juara 1, disusul stand Kabupaten Kapuas dan stand Dinas Kesehatan Kalteng masing-masing meraih juara 2 dan 3.***



Wagub : Pendidikan, Pilar Penting Dalam Pembangunan Karakter dan Budaya

Palangka Raya – Biro PKP. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menegaskan pendidikan telah membukakan mata dan kesadaran untuk membangun sebuah negeri yang berakar pada adat dan budaya yang beragam. Proses pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan karakter dan budaya di lingkungan masyarakat.

Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dan berkesinambungan agar pendidikan di Kalimantan Tengah dapat merata sampai ke Kabupaten dan Kota. “Saya pandang sangat tepat dan pentingnya informasi zaman sekarang untuk memudahkan masyarakat mencari informasi yang dibutuhkannya, termasuk informasi tentang pendidikan yang ada di Kementerian Perhubungan RI”, kata Wagub Kalteng di hadapan peserta Sosialisasi Terpadu Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan/Seleksi Penerimaan Calon Taruna dan Taruni Tahun 2020 di Palangka Raya, Selasa (03/03/20).

Sosialisasi dan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni di Sekolah Kedinasan lingkup Kementerian Perhubungan RI ini bertujuan menarik minat putera/puteri terbaik Kalimantan Tengah untuk menempuh pendidikan di sekolah kedinasan tersebut.

Habib Ismail mengharapkan Sosialisasi dan Seleksi Penerimaan Taruna dan Taruni Sekolah Kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan RI dapat menyerap putera-puteri terbaik Kalteng menjadi tenaga teknis di bidang perhubungan. “Kabupaten/Kota juga dapat melakukan kerjasama menggunakan pola pembibitan dengan Kementerian Perhubungan RI”, harapnya.

Disebutkan, pemerintah provinsi Kalimantan



Habib Ismail bin Yahya
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Tengah tahun 2014 dan 2015 merekrut 29 orang taruna dan taruni terbaik Kabupaten dan Kota se-Kalteng untuk mengikuti pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia di Bekasi dan Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun.

Ke-29 orang Taruna dan Taruni itu telah lulus tahun 2017 dan 2018 yang sudah ditempatkan menjadi tenaga teknis perhubungan di Kalimantan Tengah. Saat ini juga tercatat 13 orang putera/puteri terbaik Kalteng menempuh pendidikan kedinasan di Kementerian Perhubungan RI melalui pola pembibitan.

Kementerian Perhubungan RI memiliki 26 Sekolah Kedinasan terdiri 6 Sekolah Matra Darat, 12 Sekolah Matra Laut dan 8 Sekolah Matra Udara dengan total 48 Jurusan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Mofit Saptono mengharapkan Sekolah Kedinasan tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga mengembangkan karakter peserta didik sehingga memiliki disiplin yang tinggi dan tetap mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara.

Sudah banyak putera/puteri Indonesia berhasil meraih kesejahteraan dan di dalam kesejahteraan itu jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. “Karena pendidikanlah maka terbuka peluang untuk hidup lebih baik. Pendidikan telah membukakan pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan dan menguatkan pilar ketahanan moral”, pungkas mantan Wakil walikota Palangka Raya itu.***

Ivo Sugianto Sabran Lantik Ketua Dekranasda Palangka Raya Periode 2018-2023

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran melantik Ketua dan Pengurus Dekranasda Kota Palangka Raya Periode tahun 2018-2023 di Aula Rumah Jabatan Walikota Palangka Raya, Sabtu (14/3/2020).

Pelantikan Ketua dan Pengurus Dekranasda Kota Palangka Raya tersebut dihadiri Walikota Palangka Raya Fairid Naparin selaku Pembina Dekranasda Kota Palangka Raya, Pengurus Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala OPD Kota Palangka Raya, Ketua Organisasi Wanita dan Kemasyarakatan Kota Palangka Raya.

Ketua Dekranasda Palangka Raya Periode 2018-2023 itu diketuai Emnestiningsih menggantikan Hj.Norliana Riban Satya.

Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran mengatakan terbentuknya Dekranas secara berjenjang dari pusat hingga daerah bertujuan untuk menggali, melestarikan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas warisan budaya di bidang kerajinan dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa.

Untuk mewujudkan hal itu harus didukung dengan partisipasi aktif Dekranasda Kota Palangka Raya khususnya dalam memberikan fasilitas, pembinaan dan pelatihan kepada pengrajin dalam upaya meningkatkan motif design dan kemasannya. "Dengan adanya keberadaan Dekranas tentunya kita dituntut senantiasa untuk mendorong kreativitas para pengrajin. Sebenarnya produk kerajinan Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya sangat potensial. Namun, seringkali yang saya temukan pembinaan dan pelatihan masih ada kekurangan seperti dalam hal perancangan motif dan kemasannya," beber Ivo Sugianto Sabran.

Ivo mengatakan di era modern, motif dan kemasan sangat diperhatikan sebagai daya tarik dan nilai jual yang menjadi salah satu faktor kualitas barang kerajinan. "Ke depannya saya berharap Ketua Dekranasda Kota Palangka Raya yang baru dapat senantiasa membina para pengrajin khususnya di Kota Palangka Raya untuk terus mendorong kreativitas mereka terutama dalam mengenai kualitas, motif dan packaging (kemasan)", ungkapnya.

Diharapkan program-program



Dekranas Pusat dapat dijalankan dan terus meningkatkan kemampuan para pengrajin produk-produk kerajinan Kota Palangka Raya sehingga berdaya saing. "Berkembangnya para pengrajin akan berefek positif terhadap perekonomian suatu daerah dan kita turut serta dalam melestarikan budaya daerah," kata Ivo.

Walikota Palangka Raya Fairid Naparin yakin dan optimis Palangka Raya mampu mengelola dan meningkatkan kualitas kerajinan tangan bersinergi dengan Dekranasda Kalteng, mengingat Palangka Raya dalam angka dan data memiliki potensi dan SDM unggul luar biasa yang didukung pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya di angka 7,5 %. "Berarti SDM kita telah mendukung pertumbuhan ekonomi, peluang dan persaingan sangat terbuka. Semakin tinggi pertumbuhan maka semakin tinggi persaingan. Peluang ada, keunggulan ada, sehingga bagaimana kita menggali potensi tersebut untuk bernilai daya saing," ungkapnya.

Pemerintah Kota Palangka Raya juga menggandeng dan berkolaborasi dengan pengusaha dan pengrajin lokal yang berpusat di kota Palangka Raya yang tergabung dalam "Rumah Handep" yang akan dibuka di Jl. Seth Adji Palangka Raya.

Pengrajin lokal kota Palangka Raya "Rumah Handep" akan mewakili Kalimantan Tengah di ajang internasional "Indonesia Fashion Week Tahun 2020". Rumah Handep ini nanti menjadi Pusat Kerajinan UMKM di Palangka Raya.***



Rencana Pembangunan RS Tipe A di Kalteng Terus Dimatangkan.

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai langkah untuk mematangkan realisasi pembangunan Rumah Sakit Tipe A melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul menjelaskan beberapa persyaratan pendirian Rumah Sakit Tipe A tersebut termasuk persetujuan dari pihak DPRD Kalimantan Tengah. Saat ini pemerintah provinsi Kalteng masih menunggu persetujuan DPRD Kalteng. “Seluruh Komisi di DPRD Kalteng akan membahasnya dan selanjutnya diparipurnakan sebagai dasar untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Barulah Mendagri mengeluarkan persetujuan pembangunan RS Tipe A ini”, jelas Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul sesuai audiensi dengan Jajaran DPRD Kalteng di Palangka Raya, Senin (02/03/20).

Suyuti Syamsul mengatakan saat ini rencana pembangunan RS Tipe A itu masih terus berproses dan diupayakan akhir tahun 2020 sudah memasuki proses transaksi, sedangkan peletakan Batu Pertama akan dilakukan apabila sudah

mendapatkan persetujuan DPRD Kalteng. “Apabila ada persetujuan DPRD Kalteng, maka dapat dilakukan peletakan Batu Pertama pembangunan RS Tipe A tersebut”, tegasnya.

Dijelaskan, pembangunan RS Tipe A ini menggunakan skema KPBU karena dana untuk pembangunannya mencapai Rp. 1,54 triliun. Namun jumlah dana tersebut telah dilakukan pemangkasan terhadap beberapa hal yang dianggap bisa ditunda, sehingga dana yang diperlukan tidak terlalu banyak. “APBD Kalteng tidak mencukupi untuk pembangunan RS Tipe A ini, namun sistemnya pemerintah provinsi mencicil pembayarannya selama 18 tahun”, bebernya kepada sejumlah awak media.

Apabila Rumah Sakit Tipe A ini bisa dibangun maka dampaknya luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Tahun 2018 saja tercatat sekitar 6.000 orang yang harus dirujuk untuk berobat ke luar Kalimantan Tengah. “Diharapkan dengan pembangunan RS Tipe A ini, tidak ada lagi masyarakat yang harus keluar Kalteng untuk berobat. Justru sebaliknya, RS Tipe A ini menjadi rujukan bagi daerah di luar Kalteng”, pungkasnya.***

Gubernur : Pemprov Kalteng Intensifkan Antisipasi Penyebaran Covid-19.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait terus mengintensifkan pengawasan terhadap arus masuk manusia ke Kalimantan Tengah melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara Iskandar dan Pelabuhan Kumai Pangkalan Bun Kotawaringin Barat serta Bandara H. Asan Sampit Kotawaringin Timur dan Pelabuhan laut lainnya. “Semua pintu masuk ke Kalimantan Tengah itu telah dipasang thermal scanner guna memastikan kesehatan setiap orang yang masuk ke wilayah ini”, terang Sugianto Sabran dalam Konferensi Persnya di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Sabtu (14/3/20).

Sugianto Sabran menegaskan pemerintah Kalimantan Tengah juga menyiapkan dana



APBD guna mendukung upaya mengatasi virus mematikan itu serta menginstruksi kepada Bupati dan Walikota se-Kalteng agar menutup sementara semua aktivitas di tempat hiburan malam.

Gubernur Kalimantan Tengah juga menghimbau warga masyarakat agar mengurangi kontak fisik dan mengganti jabat tangan dengan salam, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pendeteksian dan pencegahan masuknya Covid-19

ke Kalteng serta menjaga ketenangan, ketertiban, tidak panik dan tidak menimbun bahan pokok yang dapat menyebabkan kelangkaan barang.

Selain itu kepada pegawai, karyawan dan anak yang sakit ISPA diizinkan tidak masuk kerja atau sekolah berdasarkan keterangan dokter, mencegah dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan serta melarang awak kapal asing turun ke darat dan melarang warga Kalteng naik kapal asing kecuali petugas. Upaya lainnya adalah penyemprotan disinfektan di fasilitas umum termasuk tempat-tempat ibadah.

Sugianto Sabran juga menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan pengelola beberapa destinasi wisata seperti Taman Nasional Sebangau dan Tanjung Puting terkait kedatangan wisatawan atau warga asing. "Negara-negara terdampak

Covid-19 tidak boleh dulu ke Kalteng demi menjaga Kalimantan Tengah dan masyarakatnya," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan RSUD dr. Murjani Sampit sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 serta menyediakan call center 08125086776, 082357720665 dan 08115230044 atau call center Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat jika mendapati orang dengan gejala Covid-19 di lingkungan masing-masing.

Disebutkan, saat ini tercatat 12 orang dari 15 orang terduga Virus Corona (Covid-19) di Kalimantan Tengah yang dirawat intensif di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya dinyatakan negatif dan 3 orang lainnya masih menunggu hasil observasi.***

Gubernur Sugianto Sabran Tetapkan Status Tanggap Darurat Di Kalteng

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menegaskan wilayah Kalimantan Tengah ditingkatkan statusnya dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 menyusul 2 orang warga Kalteng yang diisolasi dinyatakan positif Covid-19.

Sugianto Sabran menghimbau warga masyarakat Kalimantan Tengah tetap tenang dan menjaga kesehatan sesuai ketentuan pencegahan Covid-19 serta tidak menumpuk bahan pokok berlebihan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota juga telah meliburkan sekolah dari PAUD hingga Perguruan Tinggi sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

Sementara itu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung dalam Keterangan Pers di Palangka Raya, Jumat sore (20/03/20) menjelaskan jumlah Orang Dengan Pemantauan (ODP) mencapai 130 orang dan ODP terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Timur 33 orang.

Kemudian Pasien Dalam Pengawasan (PDP) suspect Covid-19 di Provinsi Kalteng 29 orang dengan hasil negatif Covid-19 sebanyak 10 orang dan positif Covid-19 sebanyak 2 orang, sedangkan 17 orang lainnya masih menunggu hasil laboratorium. "Terkait hal tersebut, maka pada hari ini tanggal 20 Maret 2020 ditetapkan Status

Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah," ungkap Leonard S. Ampung.

Tim Gugus Tugas Covid-19 Kalteng juga mengungkapkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih mendapatkan perawatan masing-masing 24 orang di RSDS Palangka Raya dan di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun 5 orang.

Pasien Dalam Pengawasan tersebut berasal dari Kota Palangka Raya 21 orang, Kotawaringin Barat 3 orang, Sukamara 1 orang, Lamandau 1 orang, Seruyan 1 orang, Barito Selatan 1 orang dan di Kabupaten Barito Utara 1 orang.

Pemerintah telah menetapkan 3 Rumah Sakit Rujukan di Kalimantan Tengah yang sudah menyiapkan 7 ruangan dengan kapasitas 36 tempat tidur dan sudah terpakai 25 tempat tidur. "Terkait kondisi Pasien Dalam Pengawasan atau PDP suspect Covid-19 yang sedang dalam perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan Rumah Sakit Doris Sylvanus, kondisinya sampai saat ini masih distabilkan," jelas Leonard.

Tiga Rumah Sakit di Kalteng telah menerima Alat Pelindung Diri (APD) dan Virus Transport Medis (VTM) masing-masing RSUD dr. Doris Sylvanus menerima sebanyak 30 kotak VTM dan Lidi Swab serta 30 paket APD, RSUD Pulang Pisau 27 kotak VTM dan Lidi Swab serta 20 Paket APD dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menerima 26 kotak VTM dan Lidi Swab serta 18 Paket APD.***

Pemprov Kalteng Bentuk Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Kalteng

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Gugus Tugas untuk melakukan langkah cepat, tepat dan terkoordinasi dalam pencegahan Covid-19 di wilayah Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas, sekaligus memperkuat Gugus Tugas yang telah dibentuk di Kabupaten se-Kalimantan Tengah.

Pemerintah provinsi Kalteng juga telah menyiapkan dana untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah. “Kita menyiapkan dana Rp 50 miliar di dana tak terduga untuk menghadapi Covid-19 ini,” jelasnya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran pada Rapat Koordinasi Pencegahan Covid-19 di Palangka Raya, Selasa sore (17/03/20).

Dikemukakannya, dalam tiga bulan ke depan akan dilakukan langkah-langkah terpadu menghadapi Covid-19 sesuai Instruksi Presiden RI Joko Widodo. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mulai pekan ini meliburkan sekolah selama 14 hari ke depan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan Covid-19. “Untuk sekolah akan kita liburkan semua dari PAUD sampai Perguruan Tinggi selama 14 hari. Bukan hanya liburan saja, tapi ada belajar di rumah,” papar Sugianto Sabran sembari menegaskan Ujian Nasional SMK yang sedang berjalan saat ini tetap berlanjut, sedangkan UN SMA kemungkinan akan ditunda.

Rapat Koordinasi tersebut juga membahas berbagai upaya menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok dan inflasi tidak terlalu tinggi. “Kita jaga semuanya bagaimana inflasi Kalteng ini tidak terlalu tinggi terutama terhadap 9 bahan pokok. Satgas akan bertindak, penimbun-penimbun kita tangkap. Dana tak terduga ini bisa juga dipakai untuk pembelian 9 bahan pokok supaya menahan laju inflasi,” pungkas Gubernur.

Sementara itu Kadis Perkimtan Leonard S. Ampung selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Kalteng menjelaskan pihaknya saat ini tengah menyiapkan Instruksi Gubernur menyusul Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah beberapa hari lalu yang berisi imbauan dalam

menghadapi Virus Corona. “Kita lagi menyiapkan Surat Instruksi. Kemarin, edaran sudah. Kita akan lebih detilkan lagi. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan Satgas Pusat mengenai Covid-19,” jelasnya.

Leonard Ampung menjelaskan pada Rapat Koordinasi juga dibahas dampak ekonomi akibat Virus Corona. “Termasuk mungkin ada istilah semi isolasi, tapi itupun untuk daerah-daerah wisata. Kalau ada tamu asing, kita akan batasi,” imbuhnya.

Perkembangan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kalteng akan terus diinformasikan melalui Posko di Kantor Dinas Kesehatan Kaltengalan Yos Sudarso Palangka Raya.

Dijelaskannya, Status Siaga Darurat akan segera ditetapkan menyusul langkah-langkah pencegahan yang sudah mulai dilakukan. Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) XXX Tingkat Provinsi Kalteng di Buntok Kabupaten Barito Selatan juga akan dievaluasi dalam 3 hari ke depan. “Apakah akan diundur, kita lihat perkembangan dalam 1-2 hari ini,” ungkap Leonard.

Sampai saat ini di Kalimantan Tengah belum ditemukan kasus positif Virus Corona. “Sampai saat ini di Kalteng masih negatif. Total yang sudah kita isolasi termasuk yang sudah keluar, sudah lepas dari isolasi 25 orang se-Kalteng. Saat ini yang masih dalam ruang isolasi ada 11 di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya tambah 3 di Pangkalan Bun, jadi ada 14,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kalteng dr. Suyuti Samsul.

Suyuti Syamsul menjelaskan 14 orang tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan diharapkan semua negatif sehingga bisa dilepas menjadi Orang Dalam Pengawasan dalam beberapa waktu ke depan. “Kondisi terakhir sampai saat ini yang kita isolasi jenis statusnya Pasien Dengan Pengawasan (PDP). Warga negara asing tidak ada,” tambah Suyuti.

Dijelaskannya, sebagian pasien yang masuk ruang isolasi di Rumah Sakit di Kalteng memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dan sebagian lainnya pernah berkunjung ke daerah lainnya di Indonesia yang terjangkit Covid-19.***



H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah



HABIB ISMAIL BIN YAHYA
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HIMBAUAN

CEGAH VIRUS CORONA (COVID-19)

1. Membiasakan pola hidup sehat dan bersih, antara dalam bentuk ;
 - Mencuci tangan secara rutin;
 - Membersihkan badan minimal 2 (dua) kali sehari;
 - Berolahraga secara rutin;
 - Makan dan minuman yang bergizi; dan
 - Menjaga kebersihan rumah, sekolah dan tempat ibadah.
2. Menjaga jarak fisik antar manusia dan atau menghindari kontak fisik dengan orang dan barang yang dapat menyebarkan virus.
3. Menghindari kerumunan masa dalam berjumlah besar.
4. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak panik, serta tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan.
5. Segera melapor ke puskesmas/rumah sakit atau pihak terkait lainnya, jika terdapat tanda-tanda penularan COVID-19 di lingkungan sekitar tempat tinggal dan tempat kerja.
6. Penyediaan tempat cuci tangan di fasilitas umum seperti tempat ibadah, warung, sekolah, pasar, dan lain-lain.
7. Memperbanyak taubat, zikir, dan doa sesuai dengan agama masing-masing.



GEJALA KLINIS

- DEMAM
- BATUK, PILEK
- GANGGUAN (SESAK) PERNAPASAN
- SAKIT TENGGOROKAN
- LETIH LESU

**BERSAMA KITA CEGA
VIRUS CORONA (COVID-19)**



<http://www.birokp.kalteng.go.id>



<http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>



http://www.twitter.com/setda_kalteng



[@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/sekretariat.daerah.kalteng)



buletin.isenmulang@gmail.com